



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebuah lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten, merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN), Hakim anggota, panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengadilan TUN Palembang merupakan salah satu pilar negara hukum di Indonesia dalam fungsinya melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam ranah administrasi negara atau penyelenggara urusan pemerintahan di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia keberadaan PTUN pada umumnya dan PTUN Palembang khususnya merupakan amanat dari Undang-Undang no 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Adapun berbagai kendala yang menyulitkan para pegawai, yaitu dimana pendataan putusan diantaranya, Putusan Tingkat I Sampai dengan Berkekuatan Hukum Tetap mengenai objek sengketa, kompetensi PTUN, mengenai kepentingan dan legal standing penggugat, dan masih banyak lagi, yang masih dilakukan secara manual dan dimana pendataan putusan manual menyulitkan para pegawai



dalam mencari dokumen pendataan putusan yang telah berlalu bertahun-tahun, selain itu juga beberapa dari tamu yang datang untuk memeriksa riwayat putusan kebanyakan dari mereka lupa akan nomor putusan dan ada juga yang lupa akan nama dari penggugat ataupun tergugat, yang dimana para tamu yang bersangkutan harus mendatangi terlebih dahulu kantor PTUN untuk menanyakan riwayat dokumen putusan salah satu contohnya, mengenai objek sengketa, mengenai kompetensi pengadilan tata usaha negara, mengenai kepentingan dan legal standing penggugat, mengenai tenggang waktu dan masih banyak lagi, maka tamu harus mendatangi kantor lalu menunggu antrian untuk menanyakan langsung kepada pegawai yang bersangkutan, lalu perlu waktu lagi bagi tamu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai riwayat putusan yang dicari sementara pegawai memerlukan waktu lagi untuk mencari dokumen putusan yang jumlahnya lumayan banyak yang masih dicari datanya secara manual.

Dengan demikian agar terbentuknya efektivitas dalam pekerjaan para pegawai. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menawarkan suatu sistem **“Aplikasi Pendataan Direktori Putusan Tingkat I Sampai dengan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang Berbasis Website”** untuk para mitra Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar membantu memudahkan dalam mengelola administrasi dan aktivitas perkantoran.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana membuat Aplikasi Pendataan Direktori Putusan Tingkat I Sampai Dengan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang Berbasis Website” data yang dimaksud disini ialah riwayat putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan TUN Palembang yang dimana nantinya dapat membantu baik tamu maupun pegawai TUN Palembang.



### **1.3 Batasan Masalah**

Dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pokok permasalahan menjadi beberapa hal berikut :

1. Data yang diolah hanya seputar pencarian data Dokumen Direktori Putusan Tingkat I Sampai Dengan Berkekuatan Hukum Tetap.
2. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Palembang.
3. Aplikasi ini dapat melihat informasi dokumen mengenai putusan PTUN yang ingin dicari melalui nomor putusan jika tidak mengingatnya maka dapat dicari juga melalui nama penggugat atau tergugat, atau juga bisa dicari melalui kasus putusannya. Aplikasi ini dibuat penulis untuk Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.4.1 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian Laporan Akhir adalah sebagai berikut :

1. Agar terbentuknya aktivitas pencarian dokumen putusan perkara yang lebih efisien yang dapat Membantu Pengadilan TUN Palembang melakukan peningkatan kerja sama yang baik antara tamu dan pegawai serta mempermudah pegawai pengadilan TUN Palembang dalam mengelola dokumen riwayat Putusan Tingkat I Sampai Dengan Berkekuatan Hukum Tetap..
2. Memberikan manfaat aplikasi kepada pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang dalam mengelola riwayat data direktori putusan tingkat I sampai dengan berkekuatan hukum tetap.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa DIII Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.



### **1.4.2 Manfaat**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian Laporan Akhir yaitu :

1. Mempermudah pegawai yang ingin melakukan pencarian riwayat data direktori putusan tingkat I sampai dengan berkekuatan hukum tetap.
2. Mempermudah staff bidang administrai dalam mengontrol dokumen riwayat direktori putusan tingkat I sampai dengan berkekuatan hukum tetap pada PTUN Palembang.
3. Terciptanya perkembangan yang signifikan dalam melakukan hubungan kerjasama yang baik antara para tamu dengan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data**

Data yang didapatkan berasal dari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Palembang. yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No.67, 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II. Kota Palembang, Sumatera Selatan.

### **1.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengambilan informasi penulis menggunakan metode pengumpulan data untuk mendukung tercapainya pembuatan Laporan Akhir ini :

#### **1. Data Primer**

Data primer yang penulis didapatkan sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang mengenai aktifitas pegawai dan juga aplikasi yang akan dibuat dan informasi yang dibutuhkan penulis.

##### **b. Observasi**

Penulis melakukan observasi bagaimana Kumpulan dokumen direktori putusan tentang putusan tingkat I sampai dengan berkekuatan hukum tetap dan juga kasusnya yang masih tersusun dan tersimpan di ruangan



penyimpanan dokumen-dokumen direktori putusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder yang penulis didapatkan sebagai berikut :

1. Data resmi mengenai kantor yang menjadi lokasi tempat penelitian khususnya di bidang pendataan dokumen direktori putusan tingkat I sampai dengan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan tata usaha negara Palembang.
2. Data pendukung yang di dapat dari Website Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Palembang.
3. Referensi dari buku, jurnal, dan Laporan Akhir Alumni Jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dengan demikian agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai isi dan pembahasannya, maka penulisan Laporan Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara garis besar dengan singkat dan jelas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk dasar pembahasan laporan. Secara garis besar landasan teori ini akan membahas tentang pengertian judul, teori program yang berkaitan dengan aplikasi yang digunakan dan teori khusus mengenai teori perancangan sistem.

**BAB III            GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang, Visi dan Misi, Motto, Struktur Organisasi, serta hal lain yang berhubungan dengan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang.

**BAB IV            HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai Aplikasi Pendataan Direktori Putusan Tingkat I Sampai Dengan Berkekuatan Hukum Tetap Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palembang Berbasis Website.

**BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab penutup yang di dalamnya berisi poin-poin dari berbagai hal yang menjadi sebuah kesimpulan. Selain itu pada bab ini juga memiliki beberapa saran dari penulis terkait dengan isi laporan.